Jurnal Pengabdian Manajemen Volume 6 No. 01 Tahun 2026 P-ISSN : 2808-2400
http://dx.doi.org/10.30587/jpm.v6i01.11945 E-ISSN : 2808-0076

Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Transparansi TKD dan SOP Siskeudes di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo, Bojonegoro

Strengthening Village Financial Management through Transparency of TKD and SOP Siskeudes in Sukorejo Village and Sraturejo Village, Bojonegoro

[1*)] Firda Ayu Amalia*, [2)]Novi Primita Sari, [3)]Djoko Sigit Sayogo, [4)]Sri Budi Cantika Yuli
[1,3)]Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
[2,4)]Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi
Universitas Muhammadiyah Malang
Jalan Raya Tlogomas 246 Malang

*Email korespondensi: firdaayu@umm.ac.id

Histori Artikel:

Diajukan:
20/06/2026

Diterima:
11/08/2026

Diterbitkan:
19/08/2026

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, mencegah kesalahan administrasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Namun, Pemerintah Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo, Kabupaten Bojonegoro, menghadapi keterbatasan transparansi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) serta belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan transparansi TKD dan memperkuat tata kelola keuangan melalui media informasi publik serta penyusunan SOP Siskeudes. Mitra pengabdian adalah pemerintah kedua desa dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Program menggunakan metode Community Development yang partisipatif dan berkelanjutan melalui observasi, diskusi kelompok terarah, sosialisasi, pendampingan, dan monitoring. Intervensi meliputi penyusunan laporan TKD, pengembangan dashboard transparansi berbasis web, penyediaan papan informasi publik, serta penyusunan SOP Siskeudes secara partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur, pencatatan serta pelaporan TKD yang lebih teratur dan lengkap, tersusunnya draft SOP sesuai kebutuhan masing-masing desa. Pengembangan dashboard berbasis website dan papan informasi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kombinasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, standardisasi prosedur, dan teknologi informasi mampu membangun fondasi tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

***Kata kunci**: Pengelolaan Keuangan; Siskeudes; Tanah Kas Desa; Pemerintah Desa; Bojonegoro*

ABSTRACT

Transparent and accountable village financial management is essential for achieving good village governance, preventing administrative errors, and strengthening public trust. However, the Sukorejo and Sraturejo Village Governments in Bojonegoro Regency face limited transparency in the management of Village Treasury Land (TKD) and do not yet have a Standard Operating Procedure (SOP) for the use of the Village Financial System (Siskeudes). This community service activity aims to increase TKD transparency and strengthen financial governance through public information media and the development of Siskeudes SOPs. The community service partners are the governments of both villages, involving village heads, village officials, and the Village Consultative Body. The program uses a participatory and sustainable Community Development method through observation, focus group discussions, outreach, mentoring, and monitoring. Interventions include the preparation of TKD reports, the development of a web-based transparency dashboard, the provision of public information boards, and the participatory development of Siskeudes SOPs. The results of the activity show an increase in apparatus understanding, more regular and complete recording and reporting of TKD, and the development of

draft SOPs tailored to the needs of each village. The development of a website-based dashboard and information boards also expanded public access to village financial information. These findings demonstrate that a combination of increased capacity of village government officials, standardized procedures, and information technology can build a foundation for more transparent and accountable village financial governance.
***Keywords**: Financial Management; Siskeudes; Village-Owned Land; Village Government; Bojonegoro*

PENDAHULUAN

Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia dan memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas (Mannan et al., 2023; Udzmah et al., 2024). Akuntabilitas tersebut merupakan cara untuk memastikan terkait pengelolaan dana yang dimiliki oleh desa sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Satya & Efendi, 2023; Udzmah et al., 2024). Dalam UU. No. 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa keuangan desa harus dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif dan sesuai dengan disiplin anggaran. Desa desa Sukorejo dan Sraturejo yang terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakatnya merupakan mitra dalam pengabdian ini. Mayoritas penduduk berkerja sebagai petani dan peternak.

Berdasarkan survei awal, wawancara, dan penyebaran pretest kepada 27 perangkat Pemerintah Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo, diperoleh rata-rata tingkat pemahaman awal mengenai transparansi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) dan penggunaan Siskeudes sebesar 54%. Sebanyak 21 perangkat desa atau 70% belum mengetahui secara lengkap informasi pengelolaan TKD yang wajib disampaikan kepada masyarakat, seperti luas dan bentuk pemanfaatan TKD, nilai penerimaan, penggunaan hasil TKD, dan periode pelaporan.

Hasil observasi terhadap media informasi publik juga menunjukkan bahwa selama satu tahun terakhir, kedua desa belum memublikasikan laporan pengelolaan TKD secara khusus dan berkala melalui website maupun papan informasi desa. Publikasi informasi keuangan masih bersifat umum dan belum memuat rincian pengelolaan TKD. Selain itu, sebanyak 16 dari 27 perangkat desa atau 60% belum memahami secara memadai tahapan penggunaan Siskeudes, terutama proses input data, verifikasi dan otorisasi transaksi, pengarsipan dokumen, penyusunan laporan, serta pencadangan data. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengatur alur penggunaan Siskeudes, pembagian tugas, jadwal pelaporan, dan mekanisme pengendalian data.

Temuan awal ini menjadi dasar penetapan peningkatan transparansi pengelolaan TKD dan penyusunan SOP Siskeudes sebagai prioritas program pengabdian pada tahun pertama. Berdasarkan penjelasan mitra, tim pengabdi mencatat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemdes Sukorejo dan Sraturejo sekalipun sudah menggunakan siskeudes adalah: 1). Pengelolaan TKD yang kurang transparan, 2). Proses penyusunan APBDes kurang optimal karena minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat, 3). Belum meratanya pengetahuan tentang peraturan dan proses pencatatan keuangan diantara perangkat desa, 4). Tidak lengkapnya dokumentasi dan bukti transaksi, 5). Belum adanya aturan terstandar terkait siskeudes. Kelima permasalahan tersebut akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun (2025, 2026 dan 2027) dan permasalahan yang diselesaikan pada tahun 2025 adalah permsalahan pengelolaan TKD yang kurang transparan dan belum adanya aturan terstandar terkait siskeudes.

Permasalahan pengelolaan TKD yang kurang transparan. Berdasarkan simulasi dengan tarif sewa rata-rata Rp12,25 juta per hektare, potensi realisasi pendapatan TKD diperkirakan sebesar Rp106,75 juta per desa per tahun. Berdasarkan kondisi awal mitra, pengelolaan TKD yang kurang transparan ini dilatarbelakangi oleh laporan realisasi pengelolaan TKD tidak dipublikasikan pada Masyarakat (Firdaus, 2022; Rembang). Hal ini dimungkinkan karena tidak ada media baik berupa papan pengumuman yang disediakan Pemdes atau secara online melalui media sosial atau website (Handayani et al., 2025; Supriatna, 2023).

Belum adanya aturan terstandar terkait siskeudes. Pemdes Sukorejo dan Sraturejo menyampaikan bahwa permsalahan terkait belum terdapat standar yang mengatur secara khusus siskeudes dialami juga oleh desa-desa yang lain. Permasalahan ini timbul karena memang belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pusat yang secara khusus membahas alur mulai dari input data, verifikasi, pengarsipan, dan pelaporan di siskeudes (Atira, 2025; Fauzi, 2024).

Dengan demikian tujuan dilakukan pengabdian ini adalah 1). Meningkatkan transparansi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) melalui pengembangan dan pendampingan implementasi media publikasi informasi pengelolaan TKD, baik secara offline maupun online, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai realisasi pengelolaan TKD secara mudah, terbuka, dan berkelanjutan. 2). Menyusun dan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai pedoman bagi perangkat desa dalam melaksanakan proses input data, verifikasi, pengarsipan, dan pelaporan keuangan desa secara terstandar guna meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan desa.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Pemdes Sukorejo dan Sraturejo selaku mitra, tim pengabdi menawarkan dua solusi untuk menyelesaikan dua permasalahan yang diselesaikan pada tahun 2025. Solusi untuk pengelolaan TKD yang kurang transparan, tim pengebdian menawarkan pembuatan papan yang berisikan informasi untuk masyarakat desa tentang pengelolaan TKD (Ana Sopanah & Bahri, 2025). Juga membuat media sosial atau website yang memuat informasi pengelolaan TKD secara daring sehingga bisa diakses secara lebih luas oleh masyarakat (Afifah et al., 2024). Terkait sub permsalahan yang terakhir, tim pengabdi mengusulkan kepada Pemdes Sukorejo dan Sraturejo untuk membuat jadwal keberkaalan publikasi pengelolaan TKD.

Solusi atas permasalahan kedua yang diusulkan tim pengabdi kepada mitra adalah bersama perangkat desa Sukorejo dan Sraturejo Menyusun SOP penggunaan siskeudes, memilih lebih banyak perangkat desa yang bisa mengoperasikan siskeudes dan meminta mitra untuk melakukan *back-up* data secara berkala.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang metode *Community Development* dengan prinsip partisipatif dan berkelanjutan dengan menyesuaikan kebutuhan mitra, yaitu Pemerintah Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo, Kabupaten Bojonegoro. Kedua desa tersebut menghadapi permasalahan yang relatif serupa, yaitu pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) yang belum sepenuhnya transparan serta belum tersedianya aturan terstandar terkait penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan desa melalui peningkatan transparansi, penyusunan regulasi desa, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan kepala desa, perangkat desa, pengelola keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat agar hasil program dapat diterima serta diimplementasikan secara optimal.

Pada permasalahan pertama, yaitu pengelolaan TKD yang kurang transparan, kegiatan diawali dengan observasi lapangan dan diskusi kelompok terarah (FGD) di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo untuk memetakan kondisi eksisting pengelolaan aset desa, mekanisme pelaporan, serta kendala yang dihadapi perangkat desa. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya transparansi pengelolaan TKD. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui forum tatap muka yang membahas prinsip akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, serta tata cara penyusunan laporan keuangan TKD yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami masyarakat. Setelah itu, peserta diberikan pelatihan teknis mengenai penyusunan laporan penerimaan, pemanfaatan, dan penggunaan hasil TKD agar perangkat desa memiliki kemampuan administrasi yang lebih baik.

Sebagai bentuk inovasi dan solusi berbasis teknologi, tim pengabdian selanjutnya mengembangkan dashboard transparansi keuangan desa berbasis web yang dapat digunakan oleh Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo untuk menampilkan informasi terkait pendapatan desa, pengelolaan TKD, realisasi anggaran, serta program pembangunan desa. Dashboard dikembangkan menggunakan *Content Management System* (CMS) berbasis web yang terintegrasi dengan basis data MySQL serta ditempatkan pada layanan *web hosting*. Teknologi tersebut dipilih karena relatif mudah dioperasikan, dapat diperbarui tanpa memerlukan kemampuan pemrograman tingkat lanjut, serta dapat diakses melalui komputer maupun telepon pintar.

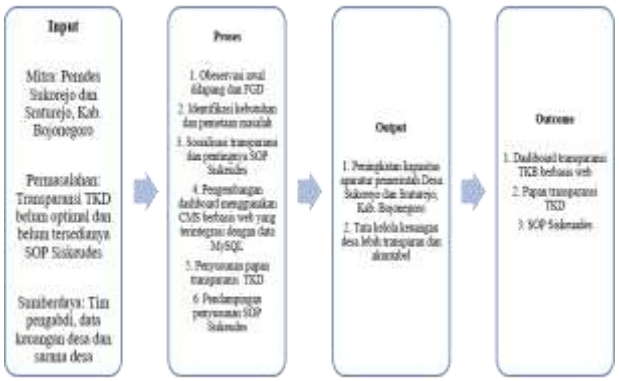
Selain media digital, tim juga mendampingi penyusunan papan informasi publik yang ditempatkan di balai desa atau lokasi strategis lainnya sebagai sarana penyampaian informasi bagi masyarakat yang belum memiliki akses internet. Dengan adanya dashboard dan papan informasi publik, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses informasi keuangan desa secara lebih cepat, terbuka, dan berkelanjutan.

Setelah tahap implementasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dan monitoring secara berkala di kedua desa. Pendampingan dilakukan untuk memastikan perangkat desa mampu mengoperasikan sistem yang telah dibangun, memperbarui data secara rutin, serta menyusun laporan TKD sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring dilakukan secara daring dan diskusi tindak lanjut guna mengidentifikasi kendala teknis maupun nonteknis selama pelaksanaan program. Dengan demikian, keberlanjutan program tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan, tetapi juga memastikan adanya perubahan praktik tata kelola desa secara nyata.

Pada permasalahan kedua, yaitu belum adanya aturan terstandar terkait penggunaan Siskeudes, kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai pentingnya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengelolaan keuangan desa. Sosialisasi ini menekankan bahwa SOP diperlukan untuk menciptakan proses kerja yang jelas, tertib, efisien, dan meminimalkan kesalahan administrasi (Permana, 2026). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo dengan melibatkan seluruh perangkat desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan administrasi. Melalui kegiatan tersebut, aparatur desa diberikan pemahaman mengenai alur penggunaan Siskeudes mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Tahap berikutnya adalah pendampingan penyusunan SOP penggunaan Siskeudes yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Desa sebagai dasar hukum operasional di masing-masing desa. Tim pengabdian bekerja bersama perangkat Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo untuk merumuskan prosedur kerja yang sesuai dengan struktur organisasi, pembagian tugas aparatur, dan kondisi riil desa. Dokumen SOP yang dihasilkan mencakup mekanisme input data, otorisasi transaksi, pengarsipan dokumen, jadwal pelaporan, serta mekanisme evaluasi internal. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terarah dan memiliki kepastian prosedur yang jelas (Anisah et al., 2025).

Melalui rangkaian metode *Community Development* tersebut. Evaluasi dilakukan menggunakan *pretest–posttest* dan lembar observasi keterampilan. Program dinyatakan berhasil apabila nilai posttest mencapai minimal 80 atau meningkat minimal 30 poin.



Gambar 1. Diagram Metode

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdi di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo pada tahun pertama difokuskan pada upaya peningkatan tata kelola keuangan desa, khususnya dalam aspek transparansi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) serta penguatan tata kelola administrasi keuangan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kedua permasalahan tersebut dipilih berdasarkan hasil identifikasi awal yang menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap prinsip transparansi serta belum adanya pedoman kerja baku dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem.



Gambar 2. Foto Bersama dengan Pemerintah Desa Sukorejo

Tahap awal kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui tahap sosialisasi yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman mitra mengenai pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan perangkat desa, pengelola keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan unsur masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi prinsip dasar pengelolaan TKD yang transparan, kewajiban penyampaian informasi kepada publik desa, serta peran strategis Siskeudes sebagai instrumen pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi. Hasil dari tahap sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra terhadap risiko pengelolaan TKD yang tidak transparan, seperti potensi konflik sosial dan lemahnya akuntabilitas, serta pentingnya SOP sebagai pedoman kerja yang mampu meminimalkan kesalahan administratif (Yap et al., 2024).

Selanjutnya, kegiatan pengabdian dilanjutkan pada tahap pelatihan yang bersifat teknis dan aplikatif. Pada tahap ini, tim pengabdi memberikan pelatihan mengenai mekanisme pengelolaan TKD yang transparan, mulai dari proses perencanaan pemanfaatan TKD, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan dan publikasi informasi kepada masyarakat desa. Selain itu, pelatihan juga difokuskan pada penyusunan SOP Siskeudes yang mencakup alur kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa perangkat desa mampu memahami tahapan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes secara lebih sistematis serta memiliki kemampuan awal dalam menyusun SOP yang sesuai dengan regulasi dan kondisi lokal desa (Biswan et al., 2025).



Gambar 3. Tampilan Pengembangan Website Transparansi TKD

Hasil nyata dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya keteraturan dan kelengkapan laporan pengelolaan TKD di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo. Perangkat desa mulai terbiasa

melakukan pencatatan transaksi secara sistematis serta menyusun laporan TKD yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, tim pengabdi juga melakukan monitoring secara berkala terhadap laporan TKD yang telah disusun, baik dari sisi kesesuaian data, kelengkapan informasi, maupun kejelasan penyajian. Monitoring ini memberikan umpan balik langsung kepada perangkat desa sehingga perbaikan dapat dilakukan secara bertahap. Dengan adanya pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan, desa mitra memperoleh model pengelolaan TKD yang lebih transparan serta mampu meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal terhadap pengelolaan aset desa.



Gambar 4. Papan Informasi TKD

Untuk permasalahan kedua, yaitu belum adanya aturan atau SOP yang mengatur penggunaan Siskeudes, hasil pengabdian difokuskan pada penyusunan



Gambar 5. Diskusi Awal Penyusunan SOP Siskeudes

SOP Penggunaan Siskeudes secara partisipatif bersama perangkat desa. Tim pengabdi memberikan pendampingan intensif dalam mengidentifikasi alur kerja pengelolaan keuangan desa yang selama ini berjalan, kemudian menerjemahkannya ke dalam prosedur baku yang terdokumentasi. Proses penyusunan SOP ini melibatkan perangkat desa yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan keuangan, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, baik di Desa Sukorejo maupun Desa Sraturejo.

Hasil yang diperoleh mitra dari kegiatan ini adalah tersusunnya draft SOP Penggunaan Siskeudes yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa. SOP tersebut mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pengendalian internal dalam penggunaan Siskeudes. Selain itu, SOP juga memuat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antarperangkat desa, sehingga dapat meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan kesalahan administratif. Melalui pendampingan yang dilakukan, perangkat desa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan manfaat SOP sebagai pedoman kerja yang mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan desa.



Tahap terakhir dari kegiatan pengabdian adalah tahap keberlanjutan program, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pelatihan dan pendampingan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan oleh desa mitra (Nugrahanti et al., 2025). Pada tahap

ini, tim pengabdi mendorong desa mitra untuk mengadopsi SOP Siskeudes sebagai pedoman resmi dalam pengelolaan keuangan desa serta memperkuat komitmen terhadap transparansi pengelolaan TKD. Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo diarahkan untuk membentuk tim internal atau menunjuk penanggung jawab yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan SOP dan pengelolaan TKD. Selain itu, dilakukan pendampingan awal dalam implementasi SOP serta penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala.

Hasil dari tahap keberlanjutan menunjukkan adanya perubahan positif dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan TKD mulai dilakukan secara lebih terbuka dengan pencatatan dan pelaporan yang lebih tertib, sementara penggunaan Siskeudes didukung oleh prosedur kerja yang lebih jelas dan terstandar. Perangkat desa juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan desa serta kesiapan untuk melanjutkan praktik tata kelola yang baik secara mandiri. Secara keseluruhan, hasil pengabdian tahun pertama ini menunjukkan bahwa pendekatan bertahap melalui sosialisasi, pelatihan, dan keberlanjutan program mampu memberikan solusi awal yang efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian pada tahun pertama memberikan manfaat langsung bagi desa mitra dalam bentuk peningkatan transparansi pengelolaan TKD serta tersedianya pedoman operasional penggunaan Siskeudes. Pendampingan dan monitoring laporan TKD membantu desa dalam membangun praktik pengelolaan aset desa yang lebih terbuka dan akuntabel, sementara pendampingan penyusunan SOP Siskeudes menjadi fondasi bagi pengelolaan keuangan desa yang lebih terstandar dan berkelanjutan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan tata kelola keuangan desa pada tahap pengabdian selanjutnya serta mendukung terciptanya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.



Gambar 6. Foto Bersama Pasca Sosialisasi TKD

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo telah menghasilkan sejumlah luaran konkret yang selaras dengan tujuan dan target program yang telah direncanakan. Luaran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup produk sistem, modul, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan mitra yang mendukung keberlanjutan program. Seluruh luaran dirancang untuk menjawab permasalahan utama mitra terkait transparansi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) dan belum adanya aturan terstandar dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Luaran utama yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya SOP Penggunaan Siskeudes di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo. SOP ini merupakan produk sistem tata kelola yang menjadi pedoman operasional bagi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa secara terstruktur dan akuntabel. SOP tersebut memuat alur kerja mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pengendalian internal. Penyusunan SOP dilakukan secara partisipatif bersama perangkat desa sehingga substansi dan implementasinya sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Keberadaan SOP ini menjadi luaran strategis karena memberikan kepastian prosedural, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta

memperkuat tata kelola keuangan desa berbasis Siskeudes (Biswan et al., 2025).

Selain SOP, luaran utama lainnya adalah sistem pendampingan dan monitoring laporan TKD yang diterapkan di desa mitra. Sistem ini tidak berbentuk aplikasi baru, melainkan berupa mekanisme kerja dan format pelaporan yang distandarkan, sehingga mudah diadopsi oleh perangkat desa. Melalui pendampingan intensif, perangkat desa mampu menyusun laporan pengelolaan TKD secara lebih sistematis, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Luaran ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan transparansi pengelolaan aset desa dan menjadi dasar bagi pengawasan internal maupun eksternal di tingkat desa (Putra & Sumtaky, 2026).

Luaran tambahan dari kegiatan pengabdian ini juga memberikan nilai tambah bagi mitra dan keberlanjutan program. Salah satu luaran tambahan adalah modul pelatihan dan materi sosialisasi yang masih dalam proses penyusunan oleh tim pengabdi dan kedepannya dapat digunakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa. Modul ini berisi materi mengenai prinsip transparansi pengelolaan TKD, tata kelola keuangan desa, serta panduan penggunaan Siskeudes sesuai dengan SOP yang telah disusun. Modul pelatihan ini dapat dimanfaatkan kembali oleh desa mitra untuk kegiatan internal maupun sebagai referensi bagi perangkat desa baru.

Selain itu, kegiatan pengabdian juga menghasilkan dokumentasi kegiatan berupa laporan, foto, dan notulensi yang merekam seluruh tahapan pelaksanaan program. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti capaian kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi desa mitra.

Dari sisi penguatan kelembagaan, luaran penting lainnya adalah meningkatnya kapasitas dan komitmen aparatur desa dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik (Pambudi, 2024). Perangkat desa tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga mengalami penguatan peran dan fungsi kelembagaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penguatan kelembagaan ini tercermin dari adanya pembagian tugas yang lebih jelas, koordinasi yang lebih baik antarperangkat desa, serta meningkatnya peran pengawasan internal melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



Gambar 7. SOP Penggunaan Siskeudes

Secara keseluruhan, hasil konkret yang dicapai dari kegiatan pengabdian telah memenuhi target yang direncanakan, baik dari sisi luaran utama maupun luaran tambahan. Produk sistem berupa SOP Penggunaan Siskeudesmenjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program dan peningkatan tata kelola keuangan desa di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo, Kabupaten Bojonegoro, berhasil memberikan kontribusi dalam peningkatan tata kelola keuangan desa melalui penguatan transparansi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring, aparatur desa memperoleh peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan terstruktur.

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan keteraturan dan kelengkapan laporan pengelolaan TKD, tersusunnya draft SOP penggunaan Siskeudes yang disesuaikan dengan kebutuhan desa, serta terbentuknya mekanisme monitoring dan pelaporan yang lebih sistematis. Selain itu, pengembangan dashboard transparansi keuangan desa dan penyediaan papan informasi publik menjadi sarana pendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, program pengabdian ini berhasil meletakkan fondasi awal bagi terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel, profesional, dan berkelanjutan serta mendukung terwujudnya prinsip good village governance di Desa Sukorejo dan Desa Sraturejo.

Bagi tim pengabdi pada tahap berikutnya, disarankan untuk melakukan pendampingan lanjutan terkait implementasi SOP Siskeudes hingga ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Kepala Desa dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat desa. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui optimalisasi dashboard transparansi keuangan desa dan integrasinya dengan media informasi publik desa. Kegiatan pengabdian selanjutnya juga dapat difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa, penguatan sistem pengendalian internal, serta pengembangan mekanisme evaluasi berbasis indikator kinerja agar keberlanjutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terjaga secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, S. N. N., Suparman, A. N., & Setiadi, B. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah Desa Bumireja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. *Jurnal Otonomi*, *1*(1), 151-164.

Ana Sopanah, S., & Bahri, S. (2025). *Akuntansi berbasis kearifan lokal menyatukan nilai tradisi dan praktik modern*. Scopindo Media Pustaka.

Anisah, E. N., Supardi, S., & Fitriah, H. (2025). Optimization of the Siskeudes Application and Village Financial Management on Financial Performance Through SOP as an Intervening Variable in Alignment with SDG's No. 1. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *8*(3), 15630-15643.

Atira, A. (2025). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(3), 1622-1629.

Biswan, A. T., Winarto, T., Imapo, Y. F., Fatimah, A., & Mariana, A. (2025). Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Akuntabilitas yang Lebih Baik. *Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, *4*(2), 140-149.

Fauzi, R. (2024). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Telukbuyung Kabupaten Karawang. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, *5*(1), 127-135.

Firdaus, A. S. Z. (2022). *Transparansi pengelolaan tanah kas desa di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].

Handayani, A., Anisa, A., Effriyanti, E., & Faozi, K. (2025). Digitalisasi laporan keuangan sebagai upaya transparansi dan

akuntabilitas BUMDes Bebedahan Berkah. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 137-145.

Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintahan desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. *Hukmy: Jurnal Hukum*, *3*(2), 364-383.

Nugrahanti, T. P., Lanjarsih, L., Mutumanikam, P. R., Safaria, S., & Hanantijo, G. M. D. (2025). Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri dan Berkelanjutan Melalui Pendampingan Sistem Keuangan. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *5*(2), 475-484.

Pambudi, S. S. I. (2024). Analisis Kebijakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Pengurus Kelembagaan Desa. *Jurnal Analis Kebijakan*, *8*(1), 48-65.

Permana, D. (2026). Penguatan Kelembagaan Desa melalui Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. *Nuras: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 470-479.

Putra, D. A. S. i., & Sumtaky, M. (2026). Transparansi Laporan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(3), 16090-16098.

Rembang, S. Efektifitas Transparansi Pengelolahan Tanah Bengkok/Kas Desa Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Satya, R. F. I., & Efendi, D. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi di Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *12*(2).

Supriatna, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Journal Education and Government Wiyata*, *1*(4), 178-185.

Udzmah, S. L., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, *9*(1), 31-42.

Yap, N., Laely, N., Triwidyati, E., Agustina, E., & Prihardini, O. W. (2024). Pelatihan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat*, *5*(1), 65-73.